**Peran Pemerintah Desa Ko’olan Dalam Penekanan *Stunting* Melalui Program Gopo (Gojek Posyandu) Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Bangkalan**

**Lailatus Suhroh**

S1 Ilmu Asministrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

[lailatus.17040674005@mhs.unesa.ac.id](mailto:lailatus.17040674005@mhs.unesa.ac.id)

**Galih Wahyu Pradana, S.Ap., M.Si**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum

Universitas Negeri Surabaya

[galihpradana@unesa.ac.id](mailto:galihpradana@unesa.ac.id)

**Abstrak**

Pembangunan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh suatu negara berkembang khususnya di Indonesia, membutuhkan adanya pemerataan yang tidak hanya terfokus pada infrastruktur dan perekonomian saja, melainkan juga dapat diselenggarakan melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan aspek kelayakan hidup masyakat yang dapat ditinjau dari segi kesehatan. Upaya tersebut, dapat dilakukan dengan cara mengurangi angka kurang gizi (*stunting*) yang menjadi salah satu faktor penghambat berlangsunngnya proses pembangunan berkelanjutan di Indonesia, hal ini dapat dilakukan melalui upaya pemerintah pusat, daerah bahkan desa yang saling bersinergi untuk mengurai masalah *stunting* melalui berbagai kebijakan dan program, sehingga persentase *stunting*  dapat ditekan. Upaya ini telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Ko’olan, Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan melalui program GOPO (Gojek Posyandu) yang diselenggarakan oleh Karang Taruna dan Bidan desa, dengan tujuan memberikan kemudahan transportasi bagi masyarakat yang tinggal ditempat terpencil untuk mengikuti program posyandu setiap bulannya. Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi pustaka. Fokus penelitian mengunakan 4 indikator menurut (Yeti, 2014: 24) meliputi : 1) Ketersediaan sarana dan prasarana, tersedianya sepeda motor yang digunakan berasal dari relawan, pemerintah desa sejauh ini hanya memebrikan bantuan berupa 3 unit HT (*Handy Talky*) untuk memudahkan relawan gojek posyandu dalam menjalankan program ini. 2) Ketersediaan anggaran, tidak adanya alokasi dana desa yang dikhususkan untuk program ini karena anggaran dana dikhususkan untuk pembangunan sekolah dan madrasah di Desa Ko’olan, 3) Kemitraan, dalam menjalankan program ini telah melibatkan karang taruna, bidan desa, pemerintah desa serta Puskesmas Kecamatan Blega dan 4) Partisipasi dari masyarakat, mendukung adanya program ini dan turut memberikan dukungan baik melalui dukungan tenaga ataupun finansial.

**Kata Kunci :**Pembangunan berkelanjutan, *stunting*, GOPO (Gojek Posyandu)

**Abstract**

Sustainable development carried out by a developing country, especially in Indonesia, requires equity that is not only focused on infrastructure and the economy, but can also be carried out through improving the quality of human resources and aspects of community life worthiness in terms of health. These efforts, can be done by reducing the number of malnutrition (stunting) which is one of the factors inhibiting the continuation of the process of sustainable development in Indonesia, this can be done through the efforts of the central, regional and even village governments that work together to solve stunting problems through various policies and program, so the stunting percentage can be suppressed. This effort has been carried out by the Ko'olan Village government, Blega District of Bangkalan Regency through the GOPO (Gojek Posyandu) this program organized by Karang Taruna and village midwives, with the aim of providing transportation facilities for people who live in remote places to participate in the Posyandu program every month. This type of research was conducted using the literature study method. The focus of the study uses 4 indicators according to (Yeti, 2014: 24) including: 1) Availability of facilities and infrastructure, the availability of motorbikes used came from volunteers, the village government so far has only provided assistance in the form of 3 HT units (Handy Talky) to facilitate volunteer gojek posyandu in running this program. 2) Budget availability, there is no allocation of village funds that are specific to this program because the funding budget is devoted to the construction of schools and madrasas in Ko'olan Village, 3) Partnership, in carrying out this program has involved youth clubs, village midwives, village government and Puskesmas Blega Subdistrict and 4) Participation from the community, supported the existence of this program and helped to provide support either through labor or financial support.

**Keywords**: Sustainable development, stunting, GOPO (Gojek Posyandu)

**PENDAHULUAN**

Pembangunan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh suatu negara berkembang khususnya di Indonesia, membutuhkan adanya pemerataan yang tidak hanya terfokus pada infrastruktur dan perekonomian saja, melainkan juga dapat diselenggarakan melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan aspek kelayakan hidup masyakat yang dapat ditinjau dari segi kesehatan. Dalam proses pelaksanaannya hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah yaitu harus mampu membentuk suatu program yang mengarah pada pembangunan berkelanjutan dengan fokus yang lebih terarah, sehingga nantinya mampu menciptakan pembangunan yang merata tidak hanya dalam segi pembangunan kepentingan pemerintah dan infrastruktur saja, akan tetapi juga memperhatikan aspek pendukung lainnya, seperti pengelolaan keuangan pemerintahan tingkat dasar sampai pusat, pengelolaan pembangunan terhadap Sumber Daya Alam bahkan Sumber Daya Manusia. Disamping itu, pemerintah juga perlu memperhatikan fungsinya sebagaimana yang disampaikan oleh Stiglitz (2000), pemerintah memeiliki fungsi distribusi, alokasi dan stabilsasi. Fungsi alokasi adalah peran pemmerintahdalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar tercipta secara efisien, fungsi distribusi adalah peran pemerintah dalam mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin adanya keadilan dalam pengaturan distribusi pendapatan. Sedangkan, fungsi stabilisasi merujuk pada tindakan pemerintah dalam mempengaruhi keseluruhan tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan harga.

Selanjutnya, pemerintah melalui fungsi distribusi harus mengupayakan stabilnya pendapatan masyarakat ataupun kelayakan hidupnya dengan cara memperhatikan tingkat kesehatan dan angka harapan hidup masyarakat, terutama bagi kalangan menengah kebawah. Langkah selanjutnya, yaitu adanya upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengurai masalah kekurangan gizi (*stunting*) bagi generasi pada masa yang akan datang, yang secara tidak langsung akan berdampak pada pembangunan dan roda perekonomian di Indonesia. Pada umumnya, *stunting* terjadi mulai dari dalam kandungan dan baru terlihat saat anak berusia dua tahun. Sedangkan menurut UNICEF, *stunting* merupakan presentase anak-anak usia 0 sampai 59 bulan, dengan tinggi dibawah minus (*stunting* sedang dan berat) dan minus tiga (*stunting* kronis) diukur dengan standar pertumbuhan anak keluaran WHO (*World Health Organization*).

Permasalahan stunting sendiri mampu membawa dampak terhadap misi pembangunan daerah bahkan bagi negara, karena secara tidak langsung jumlah persentase *stunting* yang dimiliki oleh masing-masing daerah dengan capaian diatas rata-rata mampu mempengaruhi daya saing generasi pada masa yang akan datang, disamping itu menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, peningkatan *stunting* mampu menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 0,7% hingga 2% Produk Domestik Bruto (PDB) untuk negara berkembang sehingga secara tidak langsung hal tersebut mampu membawa kerugian sekitar kurang lebih Rp. 300 Triliun akibat adanya kekurangan gizi mikro dan menghambat bonus Demografi di Indonsia. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), jika dibandingkan dengan data *stunting* tahun 2018 yang mencapai angka 30,8 %, jumlah penderita *stunting* mengalami penurunan angka hingga 2,7% pada tahun 2019, walaupun demikian penurunan *stunting* masih tetap tidak mencapai standar yang ditetapkan oleh *World Health Organization* (WHO). Masalah *stunting* sendiri mulai menyebar kebeberapa Daerah terpencil dan tertinggal seperti Kabupaten Ogan Komereng Ilir yang mencapai 40,5% atau hampir setengah balita OKI mengalami *stunting* dimana angka tersebut berada diatas angka *stunting* nasional 37% .

Sementara itu, masalah stunting juga mulai menyebar ke 12 Daerah yang dianggap memiliki potensi Sumber daya Alam yang mumpuni di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data yang diperoleh Kominfo Provinsi Jawa Timur pada tahun 2019, Daerah-daerah yang masuk dalam *treatment* penanganan *stunting* terdiri dari Kabupaten Jember, Bondowoso, Probolinggo, Nganjuk, lamongan, Malang, Trenggalek dan Kediri. Sedangkan 4 Kabupaten sisanya berada di Pulau Madura, yaitu Kabupaten Sumenep, Pamekasan dan salah satunya Kabupaten Bangkalan yang menduduki urutan keempat dengan jumlah stunting terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Peningkatan jumlah *stunting* sendiri, disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor Sumber Daya Manusia yang kurang memahami adanya dampak *stunting,* ataupun faktor sosial dan budaya masyarakat.

Disisi lain, persentase kemiskinan di suatu daerah juga turut mendukung rendahnya kualitas hidupp masyarakat, hal ini dapat dibuktikan dengan persentase penduduk miskin di jawa Timur berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Tahun 2011-2019, Kabupaten Bangkalan menduduki posisi kedua setelah Kabupaten sampan, sehingga menyumbang turunnya angka Indeks Pembangunan Manusia yang berada dibawah rat-rata. Sedangkan jika dilihat dari faktor sosial dan budaya, dapat dilihat bahwasanya angka pernikahan dini masih terjadi sampai saat ini, sehingga kesiapan mental dan psikis wanita juga berpengaruh untuk melahirkan anak dalam kondisi sehat, minimnya pemahaman remaja terkait dengan dampak *stunting* dan perilaku hidup sehat selama masa kehamilan juga menjadi faktor utama mengapa tingkat gizi buruk di Bangkalan belum mampu diuraikan dengan baik.

Melalui RPJMD Kabupaten Bangkalan Tahun 2018-2023 yang bertujuan untuk meningkatka daya saing sumber daya manusia dan daerah, maka beberapa program dibentuk untuk mengurangi persenntase *stunting*, salah satunya program GOPO di Desa Ko’olan, Kecamatan Blega yang dibentuk untuk mampu memberikan kemudahan akses bagi anggota posyandu, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat terutama bagi ibu hamil. Gojek Posyandu sendiri mulai didirikan sejak tahun 201 oleh Karang Taruna dan Bidan desa melalui usaha mandiri, sehingga pada tahun 2019 program ini berhasil memperoleh penghargaan sebagai salah satu inovasi layanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timmur dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional Tahun 2019.

Akan tetapi, dibalik keberhasilan suatu program, maka terdapat kelemahan yang perlu dievaluasi untuk mengoptimalkan berjalannya gojek posyandu ini. Kelemahan mendasar terletak pada kurangnya perhatian pemerintah desa dalam pengalokasian dana untuk program GOPO sehingga karang taruna menggunakan dana pribadi untuk menjamin berlangsungnya program tersebut, kurangnya jumlah sepeda motor serta jarak tempuh antara lokasi penjemputan dengan tempat diberlangsungkannya posyandu membuat karang taruna sedikit kewalahan, sehingga mereka hanya mengandalkan telepon seluler dan HT (*Handy Talky*)untuk saling menjaga koordinasi satu sama lain. Sehingga berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan Peran Pemerintah Desa Ko’olan dalam penekanan *stunting* melalui program Gopo (Gojek Posyandu) sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bangkalan**,** yang nantinya dapat berguna untuk memperbaiki sistem dari program ini sehingga dapat dijalankan secara maksimal.

**METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, menurut George (2008), Studi Pustaka adalah pencarian sumber-sumber atau opini pakar tentang sesuatu hal berkaitan dengan tujuan penelitian. Subjek penelitian ini menggunakan teknik *pusposive sampling*, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi, sedangkan dalam proses analisis data menggunaan analisis data kualitatif melalui model interaktif menurut Miles dan Hubermaan dalam Sugiyono (2010), yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, pemaparan dan penarikan kesimpulan.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan terkait upaya pemerintah Kabupaten Bangkalan untuk mewujudkan adanya pembangunan berkelanjutan yang sedang dilaksanakan, maka selanjutnya melalui teori Yati (2014:24) dengan mmenggunakan faktor-faktor yang mempengaruhi keoptimalan dan peran pemerintah melalui 4 indikator yaitu ketersediaan sarana dan prasarana, ketersediaan anggaran, kemitraan, partisipasi dari masyarakat. Sehingga, melalui indikator yang tersedia dapat dianalisis seberapa jauh peran pemerintah Desa Ko’olan dalam menangani masalah *stunting* melalui program GOPO (Gojek Posyandu). Berikut merupakan uraian indikator-indikator tersebut :

1. **Ketersediaan Sarana dan Prasarana**

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan program GOPO (Gojek Posyandu), erat kaitannya dengan ketersediaan kendaraan dan alat komunikasi untuk menunjang keberlangsungan program ini. Sejak awal pembentukan program GOPO pada tahun 2017, hanya terdapat 3 sepeda motor yang mampu digunakan untuk antar jemput anggota posyandu. Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada salah satu anggota pendiri program ini, pada tahun 2020 jumlah sepeda motor yang dapat digunakan sejumlah 6 unit, akan tetapi sepeda motor tersebut bukan merupakan sarana transporasi yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah desa, melainkan milik masing-masing anggota pendiri GOPO yang tidak lain berprofesi debagai petani. Karena pada dasarnya pendiri GOPO ini merupakan anggota Karang Taruna yang sebagian besar berprofesi sebagai petani, maka sering terdapat kendala terkait dengan adanya penggunaan sepeda motor apabila jadwal posyandu bersamaan dengan panen padi, sehinngga proses antar jemput ibu hamil ataupun lansia yang tempat tinggalnya jauh dari lokasi posyandu tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal.

Jarak tempuh tempat tinggal anggota posyandu dengan lokasi poskesdes yang relatif jauh, kondisi jalan desa yang kurang mendukung ditambah dengan minimnya anggoota posyandu yang menggunakan *handphone,* menjadi tantangan tersendiri bagi pendiri GOPO untuk terus memutar otak agar anggota posyandu mampu mengikuti kegiatan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh bidan desa. Karena orientasi terbentuknya program ini untuk mengurangi angka *stunting* dan meningkatkan kesehatan masayarakat, maka beberapa masukan dan saran seringkali diberikan kepada pemerintah desa, terutama kepala desa dengan tujuan agar pemerintah mampu melihat output yang diberikan oleh program ini untuk meningkatkan kesejahteraan desa kedepannya. Sehingga pada tahun 2019, bantuan berupa HT (*Handy Talky*) diberikan oleh pemintah sebanyak 3 unit untuk memberikan kemudahan bagi pengendara agar mampu berkomunikasi untuk mampu memaksimalkan kinerja mereka, dan mampu memberikan pelayanan prima bagi anggota posyandu.

1. **Ketersediaan Anggaran**

Pada awal pembentukan program GOPO sejak tahun 2017 lalu, anggaran dana yang tersedia berasal dari swadaya masyarakat dan relawan, sampai sejauh ini masih belum ada campur tangan pemerintah desa terkait dengan alokasi dana desa yang disalurkan untuk program gojek posyandu. Hal ini terjadi karena anggaran dana desa yang ada telah dikhususkan untuk perbaikan sekolah dan madrasah, sehingga tidak ada dana yang dianggarkan khusus untuk program gojek posyandu di Desa Ko’olan. Walaupun demikian, relawan gojek posyandu yang berprofesi sebagai petani tidak merasa dibebankan sebab mereka menjalankan program ini dengan ikhlas, sehingga tidak ada beban moril yang ditanggung. Namun demikian, pada tahun 2020 mulai ada gerakan dari Karang Taruna yang sekaligus pendiri Gojek Posyandu ini mulai tergerak untuk lebih memperhatikan kondisi perekonommian para relawan gopo mengingat mereka yang hanya berprofesi sebagai petani dan harus membiayai keluarganya, sehingga pemerintah desa juga mulai mengupayakan adanya bantua n khusus bagi relawan untuk mendapatkan bantuan mengingat program dan kegiatan yang dijalankan membawa dampak baik badi desa kedepannya.

1. **Kemitraan**

Relawan gojek posyandu yang hanya berjumlah 8 orang dengan sebagian besar berprofesi sebagai petani, membutuhkan kerjasama dengan pihak pemerintah ataupun non pemerintah untuk mampu menjalankan program ini dengan maksimal. Selama kurang lebih 3 tahun program ini dijalankan, pihak-pihak yang dilibatkan untuk diajak kerjasama yaitu Bidan Desa, yang tentunya memiliki tanggungjawab untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dan menyediakan data terkait dengan jumlah lansia serta ibu hamil yang nantinya akan didata kembali berdasarkan tempat tinggal, sehingga nantinya akan memerikan kemudahan bagi relawan gojek untuk melakukan antar jemput. Kerjasama juga dilakukan dengan masyarakat setempat agar turut serta mendukung berlangsungnya program ini, tidak sedikit sumbangsih yang diberikan oleh masyarakat berupa tenaga dan dana yang turut diberikan kepada program ini mengingat jauhnya lokasi penjemputan, bahkan ada yang sampai berjarak kurang lebih 4km dari pos kesehatan desa.

Selanjutnya, sejak program ini mulai mulai dikembangkan dan dirasa layak sebagai salah satu inovasi untuk mengurangi persentase *stunting*, maka program ini mulai dikenalkan ke beberapa desa di Kecamatan Blega, sehinga program gojek posyandu mampu memberikan contoh dan dorongan semangat kepada desa lain untuk melakukan kegiatan ataupun membentuk program serupa, sehingga nantinya relasi antar desa dalam penanganan masalah *stunting* khususnya di Kabupaten Bangkalan. Sehingga pada awal tahun 2019, para relawan bertekad untuk melakukan banyak perubahan dimulai dari pembuatan seragam agar program ini nantinya tidak dipandang sebelah mata, sehingga dengan adanya optimism pra relawan maka program ini mulai dikenalkan juga kepada pihak Puskesmas Kecamatan Blega, pada tahun yang sama program ini mulai mengikuti lomba tingkat Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu inovasi layanan kesehatan pada saat Hari Kesehatan Nasional yang diadakan oleh Dinas Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi terdapat permasalahan yang timbul pada saat program ini mulai dikenal oleh beberapa pihak pemerintah terutama Puskesmas Kecamatan Blega dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, hal ini terjadi karena tidak adanya izin pihak puskesmas dalam pembuatan logo dan website, sehingga hal ini dianggap sebagai suatu tindakan yang kurang baik, dengan adanya musyawarah terkait masalah ini, akhirnya masalah tersebut mampu diatasi dengan baik.

1. **Partisipasi dari Masyarakat**

Sebelum terbentuknya program Gojek Posyandu, masyarakat yang mmiliki tempat tinggal jauh dari poskesdes, ditambah dengan minimnya kendaraan serta rusaknya jalan desa membuat respon masyarakat untuk mengikuti kegiatan posyandu setiap bulannya semakin menurun. Banyak kekhawatiran yang dirasakan oleh bidan desa yang secara khusus memiliki tanggungjawab penting untuk meningkatkan kesehatan para ibu hamil dan lansia, dengan demikian keluhan yang dirasakan oleh bidan desa disampaikan kepada kepala desa dan karang taruna. Berangkat dari kekhawatiran tersebut, karang taruna tergerak untuk menjalankan program ini walaupun pada awalnya terdapat banyak hambatan, seperti minimnya reaksi anggota yang lain untuk turut membantu karena tidak adanya biaya akomodasi dan upah bagi mereka, adanya *mindset* masyarakat terkait program ini yang dianggap sebagai taktik politik kepala desa, sehingga membutuhkan proses dan waktu yang tidak sebentar untuk mampu menggerakkan masyarakat dan anggota karang taruna agar memiliki misi yang sama untuk mampu mengurai masalah yang ada.

Sehingga melalui adanya musyawarah yang dilakukan oleh beberapa masyarakat, anggota karang taruna dan pemerintah desa, akhirnya program ini menemukan jalan tengah dengan melibatkan 3 orang relawan yang berasal dari karang taruna, dan pada awal tahun 2017 program ini secara resmi dijalankan oleh para relawan. Lambat laun program ini muali mendapatkan respon positif dari masyarakat, mereka juga merasa terbantu dengan adanya gojek tersebut. Sehingga pada bulan-bulan berkutnya pada saat program posyandu diselenggarakan seluruh anggota dapat meghadirinya. Karena program yang dianggap menguntungkan bagi masyarakat dan juga beberapa pihak, maka partisipasi masyarakat kian meningkat, hal ini ditandai dengan adanya respon melalui unggahan media sosial yang dimiliki oleh remaja setempat, karang taruna dan pemerintah desa, selainitu beberpa bantuan dan kesadaran masyarakat terkait tujuan utama program ini mulai meningkat.

Masyarakat juga jauh membuka pemikirannya terkait berbagai program yang dibentuk tidakah semata-mata dijadikan sebagai batu loncatan pemerintah desa untuk mendapatkan suara dari masyarakat pada saat pemilihan kepala desa. Program ini dijalankan tidak lebih untuk menekan angka pernikahan dini, peningkatan *srunting*, upaya peningkatan responsivitas masyarakat terkait pola hidup bersih dan sehat, terutama bagi kalangan iu hamil.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber, Program GOPO (Gojek Posyandu) mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat dan desa, dengan adanya program ini masyarakat khususnya lansia dan ibu hamil yang menjadi anggota aktif posyandu diberikan kemudahan dengan adanya jasa antar jemput dari rumah menuju poskesdes. Walaupun pada awal pembentukan program ini kurang mendapatakan dukungan dari masyarakat dan pemerintah desa, lambat laun gojek posyandu mulai diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah desa, kecamatan bahkan juga kabupaten. Sehingga pada tahun 2019-2020 banyak kerjasama yang mulai dibentuk dalam proram ini yang melibatakan peran Puskesmas Kecamatan Blega, pemerintah desa, karang taruna, serta masyarakat, begitupula dengan pemerintah desa se Kecamatan Blega.

Minimnya peran pemerintah desa dan tidak adanya anggaran khusus untuk mendukung berjalannya program gopo, tidak mengurangi semangat relawan untuk terus melanjutkan misi mereka agar kesehatan masyarakat dapat terjamin, terlebih program ini juga ditujukan bagi ibu hamil ataupun menyusui, sehingga nantinya kesejahteraan mereka mampu dipenuhi begitupula dengan menurunya angka kurang gizi atau *stunting* yang menjadi beban pemerintah karena bersangkutan dengan adanya pembangunan berkelnajutan yang ingin dicapai, maka dibutuhkan gerakan baik berupa program ataupun inovasi yang mampu mendukung adanya tujuan yang ingin dicapai.

**Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti memebrikan saran sebagai berikut :

1. Pihak pemerintah desa harusnya lebih memperhatikan upaya relawan yang menjalankan program gojek posyandu, sehingga usaha dan hasil yang mereka kerjakan mampu seimbang, mengingat sebagaian besar relawan yang berprofesi sebagai petani dan juga membutuhkan pemasukan harian untuk mampu menafkahi keluarganya. Karena segala bentuk anggaran dana desa mampu dikelola secara mandiri oleh pemerintah desa, hendaknya ada sebagaian dana yang dialokasikan untuk meningkatkan layanan kesehatan, sehingga pembbangunan tidak hanya terfokus pada insfrastruktur dan pendidikan saja.
2. Walaupun program ini telah dikenal oleh beberapa pihak, akan jauh lebih baik jika inovasi terkait program gojek posyandu terus dilaksanakan, hal ini bisa dilakukan dengan cara melakukan kerjasama dengan remaja setempat yang memilki kemampuan untuk mengelola website ataupun media sosial sehingga masyarakat mampu lebih terbuka lagi dengan adanya kemajuan teknologi, dengan adanya website dan media sosial tentunya kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan terkait posyandu juga mampu disoroti oleh pemerintah daerah, masyarakat juga mampu mengetahui perkembangan seputar dunia kesehatan atau bahkan persentase mengenai *stunting* dan sejenisnya, sehingga dengan adanya upaya ini secara lambat laun mampu membuka pola pikir masyarakat agar mampu menjaga pola hidupnya.

**DAFTAR PUSTAKA**

## Rujukan dari Buku

Abdoellah, Oekan S. 2016.*Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia; Di persimpangan Jalan*. Jakarta: PT Gramedia.

Anggito, Albi. & Setiawan, Johan. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.

Djiwandono, Patrius Istiarto. 2015. *Meneliti itu tidak sulit: Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Bahasa.* Yogyakarta: CV Budi Utama.

Haris, Syamsudin. 2007. *Desentralisasi dan otonomi daerah* *: Desentralisasi, Demokratisasi dan akuntabilitas Pemerintah daerah*. Jakarta: Lipi Press.

Ramayulis, Rita. dkk. 2018. *Stop Stunting dengan Konseling Gizi*. Jakarta Timur: Penebar plus (Penebar Swadaya Grup).

Setiawan, Irfan. 2018 .*Handbook Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Wahana Resolusi.

Simbolon, Demsa. 2019. *Pencegahan Stunting Melalui Intervensi Gizi Spesifik pada Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-24 Bulan*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.

Susanti, Nila. & Citerawati, Yetti Wira. 2018. *NCP Komunitas*. Malang : Wineka Media.

Yuliana, Wahida. & Hakim, Bawon Nul. 2019. *Darurat Stunting dangan Melibatkan Keluarga*. Takalar: Yayasan Ahmad Cendekia Indonesia.

Zamzam, Fakhry. 2018. *Aplikasi Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: CV Budi Utama

## Rujukan dari Jurnal dan Skripsi

Aridiyah, Farah Okky. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian *Stunting* pada Anak Balita di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan (*The Factors Affecting Stunting on Toddlers in Rural and Urban Areas)*. *Jurnal Pustaka Kesehatan*, Vol. 3, No.1 (<https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JPK/article/view/2520>)

Ginting, A.M. (2016). Pengaruh Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Terhadap Kemiskinan di Indonesia 2004-2013. *Kajian. 20* (1), 45-58 (<http://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/569>)

Jazuli, Ahmad. 2015. Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber daya Alam dalam rangka Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Recthsvinding,*Volume 4, No. 2 (<http://unsyijurnalah.ac.id/JSU/article/view/10093/7959>)

Kharismawati, Ika Surya. 2018.*Implementasi Bantuan Pangan Non Tunai(BNPT) melalui e-Warung di kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya.*Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas negeri Surabaya

Legawati, Diantika Arum. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Buyut Udik dalam Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)*. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Nugroho, Dwi Wahyu. dkk. 2012. Evaluasi penerapan pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan di Kabupaten Boyolali, *Jurnal Sosiologi*, No1-5, (http://eprintsundip.ac.id)

Prastika, Hamami Cahya. 2017. *Peran Pemerintah Daerah dan partisipasi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam upaya pengembangaan kerajinan kulit di Magetan.* Skripsi. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Airlangga: Surabaya.

Taher, Alamsyah. 2017. Pemikiran dan Praktek Pembanguan Berkelanjutan .*Jurnal Sosiologi*, Vol. 2, No. 2, (<http://jurnal.unsyiah.ac.id/JSU/article/view/10093>).

Rahadian, A.H. 2016. Strategi Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu sosial dan Manajemen*, Vol. 3, No.1, ([www.google.scholar.go.id](http://www.google.scholar.go.id)).

Saputri, R. A. (2019). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Stunting Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Jurnal Dinamika Pemerintahan*, *2*(2), 152-168, (http.univrab.ac.id)

Ulumiyah, Ita. dkk . 2013. Peran Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, Vol 1, No. 5, Hal 890-899,(<http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/jap/article/view/148>).

## Rujukan dari Internet

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. 2019. *Selama Tahun 2019, Pemprov Jatim Fokus di 12 Kabupaten Tangani Masalah Stunting*. <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/selama-tahun-2019-pemprov-jatim-fokus-di-12-kabupaten-tangani-masalah-stunting>. Diakses pada 24 Maret 2020

Kompas.com. (2017). *Mengenal “stunting” dan efeknya pada pertumbuhan anak.* <https://lifestyle.kompas.com/read/2017/02/08/100300123/mengenal.stunting.dan.efeknya.pada.pertumbuhan.anak?page=all>. Diakses pada 26 Maret 2020

Tempo.co. (2019). *Bapennas: kerugian ekonomi akibat kurang gizi bisa capai Rp. 300 T*. <https://bisnis.tempo.co/read/1177266/bappenas-kerugian-ekonomi-akibat-kurang-gizi-bisa-capai-rp-300-t> . Diakses pada 27 Maret 2020

## Rujukan dari Peraturan dan Undang-Undang

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2005 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah